

SKRIPSI
PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN ANTARA
LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU DI SUMATERA
BARAT DENGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DI PAPUA SEBAGAI
LEMBAGA ADAT TERTINGGI DAERAH

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ISLAMIATI
21101111082

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

**PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN ANTARA
LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU DI SUMATERA
BARAT DENGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DI PAPUA SEBAGAI
LEMBAGA ADAT TERTINGGI DAERAH**

*(Islamiati, 2110111082, Fakultas Hukum Universitas Andalas Departemen Hukum
Tata Negara (V) Tahun 2025, Halaman 92)*

ABSTRAK

Keberadaan lembaga adat di berbagai daerah di Indonesia tidak dapat terlepas dari perkembangan politik lokal dan nasional. Peran dan fungsi lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya perbandingan antara dua entitas adat yang memiliki karakteristik unik dan signifikan. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dengan sistem adatnya dan Majelis Rakyat Papua sebagai representasi adat yang diakui dalam kerangka otonomi khusus, yang menawarkan perspektif menarik untuk dikaji. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah *Pertama*, Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam sistem hukum di Indonesia? *Kedua*, Bagaimana Peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintahan di Daerah Sumatra Barat dan Papua? dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil dari pembahasan menunjukkan *Pertama*, LKAAM adalah lembaga adat yang diakui secara konstitusional (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945) dengan fungsi sosial-budaya, koordinatif dan konsultatif, tetapi tanpa kekuatan hukum yang mengikat secara formal. Sebaliknya, MRP memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU Otonomi Khusus Papua, memberikan kewenangan formal dan mengikat dalam kebijakan publik, khususnya perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua. *Kedua*, LKAAM bertindak sebagai badan konsultatif yang memberikan masukan berdasarkan nilai-nilai adat Minangkabau, namun pengaruhnya terbatas karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal. Sementara itu, MRP memiliki kekuatan kelembagaan dan hukum yang lebih luas, dengan kewenangan verifikasi dan persetujuan dalam kebijakan-kebijakan strategis, sehingga pengaruhnya dalam struktur pemerintahan formal jauh lebih signifikan, terutama dalam melindungi hak-hak dan identitas Masyarakat Adat Papua.

Kata Kunci : Perbandingan, Lembaga Adat, Kedudukan dan Kewenangan.

**COMPARISON OF POSITION AND AUTHORITY BETWEEN THE
MINANGKABAU NATURAL CUSTOMARY INSTITUTION IN WEST
SUMATERA WITH THE PAPUA PEOPLE'S ASSEMBLY IN PAPUA AS THE
HIGHEST REGIONAL CUSTOMARY INSTITUTION**

*(Islamiati, 2110111082, Faculty of Law, Andalas University, Department of
Constitutional Law (V) 2025, 92 Pages)*

ABSTRACT

The existence of customary institutions in various regions in Indonesia cannot be separated from local and national political developments. The role and function of customary institutions in the regional government system in Indonesia, especially the comparison between two customary entities that have unique and significant characteristics. The Minangkabau Natural Customary Council Institution with its deeply rooted customary system and the Papuan People's Assembly as a recognized customary representation within the framework of special autonomy, which offers an interesting perspective to study. The formulation of the problem that the author took First, What is the Position and Authority of the Minangkabau Natural Customary Council Institution (LKAAM) and the Papuan People's Assembly (MRP) in the legal system in Indonesia? Second, What is the Role of the Minangkabau Natural Customary Council Institution (LKAAM) and the Papuan People's Assembly (MRP) in Government Policy Making in the West Sumatra and Papua Regions? To answer this research, the author uses the Normative Juridical research method. The results of the discussion show that the LKAAM is a constitutionally recognised customary institution (Article 18B, paragraph 2, of the 1945 Constitution), performing socio-cultural, coordinative, and consultative functions. However, it lacks formal, binding legal powers. In contrast, the MRP has a strong legal foundation in the form of the Papua Special Autonomy Law, which provides it with formal and binding authority in public policy, particularly with regard to the protection of the rights of indigenous Papuans. Secondly, the LKAAM acts as a consultative body, providing input based on Minangkabau customary values; however, its influence is limited due to its lack of formal legal authority. Meanwhile, the MRP has greater institutional and legal power and has the authority to verify and approve strategic policies. Consequently, its influence within the formal government structure is much more significant, particularly with regard to protecting the rights and identity of indigenous Papuans.

Keywords : *Comparison, Customary Institutions, Position and Authority.*